

DAFTAR PUSTAKA

- Badar, K. A. 2013. *Sistem Penagihan Pajak*. (Online). (<http://makalahkita.blogspot.com/2013/12/penagihan-pajak.html?m=1>). diakses 1 Maret 2018.
- Bahagia, S. K. 2011. *Sistem Penagihan dan Pencatatan Pajak dan Retribusi Daerah*. Disertasi. Tidak diterbitkan. Politeknik Negeri Batam: Batam.
- Ghozali ,I. M. 2013. *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yoga Pratama: Semarang.
- Gunawan, I. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Hall, J. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta Andy: Yogyakarta.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Nuraini, O. 2015. *Analisis Sistem Penagihan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Universitas Gajah Mada.
- Oktafianisari, Y. 2015. *Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang*. Skripsi. (Online). <https://www.scribd.com/doc/268879297/Proposal-Penelitian-Analisis-Pengaruh-Penagihan-Pajak-dengan-Surat-Teguran-dan-Surat-Paksa-Terhadap-Kepatuhan-Wajib-Pajak-di-Kantor-Pelayanan-Paj>. Universitas Andalas: Padang. diakses 12 Maret 2018.
- Pribadi, T. D. 2010. *Peran Jurusita Pajak dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karang Anyar*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Rosyidi, F. 2014. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dilingkungan Kanwil DJP Jawa; Tengah I Dan Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol.3, No.1:47-58.
- Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Siregar, A. 2009. *Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Sumatra Utara*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi Medan.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 19. Tahun 2000. *tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. (Online). (<https://catarts.wordpress.com/2012/04/12/penagihan-pajak-dengan-surat-paksa/>). diakses 28 Februari 2018.

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 32. Tahun 2004. *tentang Pemerintah Daerah*. (Online). (http://fachrialharris.blogspot.com/2016/01/isi-undang-undang-nomor-32-tahun-2004_30.html?m=1). diakses 28 Februari 2018.

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 33. Tahun 2004. *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. (Online). (<https://kamoenyo.wordpress.com/2011/08/05/undang-undang-nomor-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/>). diakses 28 Februari 2018.

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 28. Tahun 2009. *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Online). (<http://pajakdaerah.blogspot.com/2012/08/pengertian-pajak-derah-dan-retribusi.html?m=1>). diakses 28 Februari 2018.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 *tentang Keuangan Negara*. (Online). (<http://www.warsidi.com/2010/01/keuangan-negara-definisi-menurut-uu-no.html?m=1>). diakses 28 Februari 2018.

